

## KESIAPAN MASYARAKAT DALAM MELAKSANAKAN WAJAR DIKDAS SEMBILAN TAHUN DI PROPINSI DIY DAN JAWA TENGAH

Oleh: Yoyon Suryono<sup>1</sup>

### Pendahuluan

Berdasarkan data dari Tim Koordinasi Wajar Dikdas Propinsi DIY, pada tahun 1993 di propinsi DIY terdapat penduduk usia 13-15 tahun sebanyak 183.507 orang dan telah dapat ditampung di SLTP dan Mts sebanyak 154.747 orang. Dengan demikian jumlah yang belum tertampung, dan ini menjadi sasaran garapan Wajar Dikdas, masih 28.760 orang dan sekitar 16.768 orang (58,42 persen) dari jumlah yang belum tertampung itu, berada di kabupaten Gunungkidul.

Sementara itu, di Propinsi Jawa Tengah berdasarkan data dari Tim Koordinasi Wajar Dikdas propinsi Jawa Tengah, pada tahun 1994/1995 penduduk usia 13-15 tahun tercatat 2.035.230 orang. Dari jumlah itu telah tertampung di SLTP dan MTs sebanyak 1.084.178 orang (53,27 persen) dan belum tertampung sebanyak 951.178 orang (46,73 persen). Kabupaten yang masih banyak memiliki anak usia 13-15 tahun belum tertampung di SLTP dan MTs antara lain kabupaten Banjarnegara, Pemasang, Batang, dan Cilacap.

Usaha-usaha penuntasan Wajar Dikdas sembilan tahun di propinsi DIY dan Jawa Tengah, terutama untuk sasaran prioritas dan potensial penduduk usia 13-15 tahun, dapat diklasifikasikan ke dalam (1) penambahan fasilitas gedung dan ruang kelas baru, (2) penambahan daya tampung, (3) pembukaan SMP Terbuka, (4) penyelenggaraan

---

*Yoyon Suryono* adalah staf pengajar pada Jurusan Pendidikan Luar Sekolah Fakultas Ilmu Pendidikan IKIP YOGYAKARTA

Program Paket B Setara, penyelenggaraan ujian persamaan, dan (5) perluasan SLB).

Penambahan fasilitas gedung dan ruang kelas baru akan dapat diwujudkan manakala tersedia dana, khususnya dari pemerintah, penambahan daya tampung untuk SLTP pagi, srta pembukaan SMP Terbuka, penyelenggaraan Program Paket B setara, penyelenggaraan ujian persamaan, dan perluasan SLB akan bergantung kepada kesediaan sasaran wajar dikdas itu sendiri, yaitu penduduk yang berusia 13-15 tahun untuk mengikuti program-program itu. Kesediaan sasaran wajar dikdas untuk mengikuti program-program penuntasan banyak ditentukan oleh kesiapan orang tua dan masyarakat untuk mendukung dan melaksanakan program-program itu. Pada sisi lain, kesiapan sasaran, keluarga, dan masyarakat untuk melaksanakan penuntasan wajar dikdas sedikit banyak akan dipengaruhi oleh latar belakang sosial, ekonomi, dan geografis tempat tinggalnya. Sesungguhnya, bagaimana kesiapan sasaran wajar dikdas dan masyarakat itu untuk ikut melaksanakan dan berpartisipasi dalam program-program penuntasan wajar dikdas di Propinsi DIY dan Jawa Tengah serta faktor-faktor apa saja yang ikut mempengaruhinya.

### **Kajian Teori**

Hakekat pendidikan dasar tidak dapat dilepaskan dari gerakan yang disebut Pendidikan untuk Semua (*Education for All*) yang telah dicanangkan di New Delhi, India, pada tahun 1987 dengan tujuan pokok untuk memberantas buta huruf dan menyebar serta meratakan pendidikan dasar. Gerakan Nasional Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun di Indonesia muncul selaras dengan azas dan deklarasi Pendidikan untuk Semua (Depdikbud, 1994).

Wajib belajar pendidikan dasar adalah kewajiban untuk mengikuti pendidikan dasar atau pendidikan yang setara sampai tamat. Dalam UU No. 2 tahun 1989 disebutkan bahwa pendidikan dasar

merupakan upaya mengembangkan sikap dan kemampuan serta memberikan pengetahuan dan keterampilan dasar yang diperlukan untuk hidup bermasyarakat serta mempersiapkan peserta didik yang memenuhi syarat untuk mengikuti pendidikan menengah.

Dalam bagian lain, UU No.2 tahun 1989 menyebutkan juga bahwa wajib belajar pendidikan dasar diselenggarakan untuk memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada warga negara yang mengikuti pendidikan dasar dan warga negara yang berumur tujuh tahun berkewajiban mengikuti pendidikan dasar yang setara sampai tamat.

Menurut UU No.2 tahun 1989, terdapat tiga bentuk pendidikan dasar yang meliputi:

1. satuan pendidikan dasar yang menyelenggarakan program pendidikan enam tahun yaitu SD, MI, dan SDLB,
2. satuan pendidikan dasar yang menyelenggarakan pendidikan program tiga tahun yaitu SLTP, MTs., dan SLTPLB,
3. satuan pendidikan luar sekolah yaitu program Kejar Paket A setara SD dan program Kejar Paket B setara SLTP.

Berdasarkan hasil penelitian Manajemen Wajar Dikdas 9 tahun pada 13 propinsi ditemukan sejumlah permasalahan dalam pelaksanaan Wajar dikdas yaitu: (1) kekurangan fasilitas guru dalam jumlah yang semakin membesar, (2) kekurangan fasilitas pendidikan untuk melaksanakan proses pembelajaran, (3) keterbatasan dana yang diperlukan dan kelemahan manajemen pelaksanaan, (4) lemahnya ekonomi orang tua, dan (5) terbatasnya dukungan masyarakat (Mohammad Fakri Gaffar, 1995).

Tim koordinasi Wajar Dikdas propinsi DIY mengidentifikasi beberapa kendala yang menghambat penuntasan wajar dikdas yang meliputi: (1) belum optimalnya tim koordinasi, (2) rendahnya aspirasi masyarakat, (3) keadaan geografi, (4) latar belakang ekonomi, (5) lingkungan belajar, dan (6) latar belakang sosial budaya (Tim Koordinasi Wajar Dikdas Prop. DIY, 1995).

Untuk melaksanakan penuntasan wajar dikdas tersebut dikembangkan lima strategi dasar dan enam program aksi. Lima strategi wajar dikdas yang dimaksud meliputi: (1) mengembangkan manajemen wajar dikdas yang kuat dan profesional, (2) menjadikan wajar dikdas sebagai gerakan masyarakat, (3) mengembangkan kerjasama yang lebih erat dengan masyarakat bisnis dan industri, (4) mengembangkan kerja sama dengan berbagai instansi dan seluruh potensi masyarakat, (5) meningkatkan efisiensi dan efektivitas kegiatan penyuluhan kepada seluruh masyarakat. Sedangkan yang dimaksud dengan enam program aksi meliputi: (1) kegiatan pemetaan anak usia 13-15 tahun, (2) penyuluhan yang berkesinambungan, (3) menyediakan berbagai alternatif pendidikan, (4) mengembangkan dan menggali daya dukung, (5) mengembangkan sistem insentif, dan (6) mengadakan koordinasi, pemantauan, pelaporan dan evaluasi (Mohammad Fakri Gaffar, 1995).

#### **Cara Penelitian**

Populasi penelitian ini adalah warga masyarakat yang mempunyai anak usia 13-15 tahun atau usia SLTP yang tidak atau belum menyelesaikan pendidikannya yang tersebar di propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Jawa Tengah.

Penelitian dilaksanakan terhadap sampel (sampel daerah dan sampel objek) yang ditetapkan secara purposif atas dasar prioritas penuntasan program wajar dikdas di wilayah kabupaten dan kecamatan serta jumlah sasaran garapan yang ada. Secara teknis penetapan sampel memperhatikan juga ukuran APK, APM, dan sejenisnya.

Variabel utama penelitian ini ialah kesiapan masyarakat dengan indikator yang meliputi kesiapan tim pelaksana, sasaran wajar didkdas, masyarakat baik mental/psikologis, ekonomik, maupun tenaga kerja, serta kesiapan mitra kerja lain khususnya dari dunia bisnis dan industri yang berupa dukungan finansial dan fasilitas lainnya.

Mengingat luasnya cakupan, sampel, serta nara sumber, maka dalam pengumpulan data digunakan kuesioner dan wawancara serta dokumen yang tersedia dengan penekanan pada penggalian data dari sasaran dan warga masyarakat.

Oleh karena sifat penelitian ini adalah survei untuk menjajagi kesiapan masyarakat, maka data yang dikumpulkan dianalisis secara deskriptif, terutama secara kualitatif dengan melakukan reduksi, paparan, verifikasi, dan penarikan kesimpulan.

### **Hasil Penelitian dan Pembahasan**

Pilihan lokasi penelitian ditetapkan Kabupaten Gunungkidul yang diwakili oleh Kecamatan Tepus untuk propinsi DIY, didasarkan atas kenyataan bahwa di lokasi ini jumlah sasaran Wajar Dikdas tercatat paling banyak bila dibandingkan dengan kabupaten/kotamadya lain yang ada di propinsi DIY.

Untuk Jawa Tengah pilihan lokasi ditetapkan kabupaten Wonosobo, bukan atas pertimbangan banyaknya jumlah sasaran, melainkan atas dasar perhitungan komparatif dengan kabupaten Gunungkidul dari aspek-aspek geografis, ekonomi, dan sosial budaya.

#### **1. Gambaran Umum Penuntasan Wajar Dikdas**

Pelaksanaan penuntasan Wajar Dikdas sampai saat ini telah memasuki tahun kedua. Untuk tahun pertama, hasil penuntasan Wajar Dikdas untuk anak usia 13-15 tahun dengan menggunakan APK dapat dikemukakan sebagai berikut.

Untuk tingkat Propinsi DIY tercatat kenaikan APK dari 84,89 persen pada tahun 1993/1994 menjadi 88,05 persen, pada tahun 1994/1995 terjadi kenaikan APK sebesar 3,16 persen. Di Kabupaten Gunungkidul kenaikan APK sebesar 27,53 persen, yaitu kenaikan dari 63,91 persen pada tahun 1993/1994 menjadi 91,45 persen pada tahun 1994/1995.

Untuk Propinsi Jawa Tengah tercatat kenaikan sebesar 3,17 persen, yaitu kenaikan dari 57,78 persen pada tahun 1993/1994 menjadi 60,95 persen pada tahun 1994/1995. Sedangkan untuk kabupaten Wonosobo kenaikan APK sebesar 14,69 persen itu kenaikan dari 60,20 persen pada tahun 1993/1994 menjadi 75,89 persen.

Karena keterbatasan data yang ada, perhitungan lain seperti APM dan angka transisi belum dapat dihitung dan disajikan datanya. Meskipun demikian atas dasar angka APK tersebut, tingkat ketercapaian propinsi DIY dengan propinsi Jawa Tengah relatif sama. Sementara untuk kenaikan yang begitu melonjak dicapai oleh kabupaten Wonosobo sebesar 14,69 persen dan kabupaten Gunungkidul sebesar 27,53 persen.

Pada umumnya APM selalu lebih rendah dari APK Oleh karena itu untuk mencapai APM ideal masih diperlukan waktu yang cukup lama karena pada tahun 1994/1995 ini, APK-nya saja masih belum menunjukkan angka ideal, terutama untuk tingkat propinsi.

## 2. Kesiapan Pemerintah

Kesiapan pemerintah di kabupaten Gunungkidul khususnya untuk kecamatan Tepus, dilihat dari perencanaan program pada umumnya sudah cukup baik. Hal ini terlihat dari perencanaan penuntasan anak usia 13-15 tahun untuk mengikuti pendidikan dasar dalam waktu dua tahun, yaitu dengan tersedianya sarana dan prasarana pendukung untuk kegiatan Wajar Dikdas 9 tahun, seperti penambahan gedung baru, lokal baru, adanya SMP terbuka serta ditambahnya kelompok-kelompok belajar Paket B.

Walaupun dilihat dari segi perencanaan dan pengelolaan, pemerintah sudah cukup memadai, namun jika dilihat dari koordinasi mengingat kegiatan Wajar dikelola oleh suatu tim, dapat disimpulkan bahwa koordinasi kegiatan Wajar kurang berjalan dengan baik karena pelaksanaan wajar dikdas lebih banyak dilakukan

oleh Kantor Pendidikan dan Kebudayaan sebagai ujung tombaknya; sedangkan instansi lain yang terkait kurang banyak berperan, sehingga dalam penggalan dana untuk kegiatan wajar selain dari pemerintah belum nampak.

Kesiapan Pemerintah Kabupaten Wonosobo, khususnya Kecamatan Kejajar yang menjadi sampel penelitian dilihat dari perencanaan program, serta sarana dan prasarana pendukung dapat dikatakan sudah siap menuntaskan anak usia 13-15 tahun untuk mengikuti kegiatan Wajar Dikdas.

Sedangkan dilihat dari koordinasi serta pembiayaan program di Kecamatan Kejajar sudah cukup baik dengan melibatkan hampir semua jajaran ditingkat kecamatan untuk aktif menggerakkan kegiatan Wajar, walaupun yang menjadi ujung tombaknya tetap Kantor Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan. Pembiayaan program Wajar Dikdas sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemerintah yang diambilkan dari APBD Tk I dan II sedang swadaya dari masyarakat belum nampak, baik yang bersifat material maupun kebijakan kerja.

### 3. Kesiapan Masyarakat

Kesiapan warga masyarakat di Kabupaten Gunungkidul, khususnya untuk Kecamatan Tepus yang memiliki jumlah warga usia 13-15 tahun terbanyak yang belum tertampung di SLTP, secara mental/psikologis sebenarnya cukup memadai, khususnya pada sasaran maupun orang tuanya. Pada umumnya sasaran dan sorang tuanya menunjukkan adanya kesiapan baik dalam hal pemahaman tentang program wajar dikdas maupun kesiapan untuk menerima, mendukung serta melaksanakan program wajar dikdas tersebut. Kesiapan sasaran dan orang tua terutama dilatarbelakangi oleh motivasi ekonomi. Artinya baik sasaran maupun orang tua sangat menaruh harapan bahwa keikutsertaan sasaran dan orang tua dalam

melaksanakan wajar dikdas nantinya akan mampu membawa hasil ke arah perbaikan ekonomi keluarga. Hal ini dapat dipahami mengingat latar belakang kondisi sosial ekonomi sasaran dan orang tuanya termasuk kategori golongan ekonomi lemah.

Namun demikian besarnya motivasi sasaran dan orang tua untuk siap mendukung pelaksanaan wajar dikdas untuk sebagian warga masyarakat akhirnya terpaksa harus terkalahkan oleh kebutuhan yang mendasar yakni memenuhi kebutuhan ekonomi yang dirasakan lebih mendesak pada saat ini. Kondisi ini ternyata membawa dampak terhadap menyusutnya jumlah peserta didik yang mengikuti kegiatan tersebut, karena peserta didik terpaksa harus bekerja (kebanyakan di luar daerah) ataupun membantu kegiatan ekonomi orang tua dan keluarga, baik pekerjaan di bidang pertanian maupun jenis pekerjaan lainnya.

Kesiapan warga masyarakat Kabupaten Wonosobo, khususnya pada daerah Kecamatan Kejajar yang memiliki APK cukup rendah (33,05%) ternyata masih memprihatinkan, terutama dilihat dari kesiapan psikologisnya. Hal ini dapat dibuktikan dari rendahnya kesiapan masyarakat, khususnya orang tua sasaran maupun sasaran itu sendiri dalam merespon program wajar dikdas.

Kondisi geografis daerah Wonosobo dengan kesuburan tanahnya yang cocok untuk ditanami berbagai macam tanaman yang dapat memberikan hasil yang baik, seperti tembakau, teh, jamur, kentang, dan sebagainya, nampaknya mampu memberikan "ketenangan" secara ekonomis-psikologis pada penduduknya. Pada umumnya para orang tua dan masyarakat menganggap bahwa hasil tanahnya relatif dapat mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari. Kondisi ini justru merupakan penyebab rendahnya motivasi orang tua dan sasaran dalam usaha meningkatkan pendidikannya. Pada umumnya pendidikan di atasnya dipandang tidak akan banyak membawa perubahan bagi kehidupannya sebagai petani.

Rendahnya motivasi sasaran dan orang tua juga disebabkan latar belakang pendidikan orang tua yang pada umumnya hanya sampai tamat SD bahkan banyak yang tidak tamat. Wawasan orang tua dan sasaran mengenai masa depan menjadi kurang luas; menganggap cara hidup saat ini sebagai petani sudah dipandang cukup. Dengan demikian usaha peningkatan pendidikan yang pada umumnya di masyarakat dianggap sebagai pembuka jalan ke arah peningkatan hidup yang lebih layak, di mata para orang tua dan sasaran tidaklah demikian, sehingga orang tua dan sasaran yang sebenarnya diharapkan mampu memberi motivasi pada putra-putranya, justru tidak dapat diandalkan.

#### 4. Kesiapan Mitra Kerja

Program Wajib Belajar Dikdas 9 tahun telah cukup tersebar dan diketahui oleh berbagai lapisan masyarakat. Namun dalam operasionalisasi kegiatan program tersebut masih belum melibatkan secara maksimal potensi yang ada di dalam masyarakat.

Masyarakat yang masuk dalam kelompok mitra kerja seperti misalnya para pengusaha, pedagang, pengrajin, tokoh-tokoh masyarakat baik formal maupun informal sudah cukup mengenal program tersebut namun keikutsertaan masih sangat terbatas. Sehingga dukungan yang diberikanpun terutama dukungan dalam bentuk finansial masih belum maksimal.

Masalah dukungan tersebut sangat terkait dengan usaha-usaha mengikutsertakan mitra kerja ke dalam bentuk-bentuk kegiatan operasional program wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun, pada tingkat yang lebih operasional.

## **Kesimpulan dan Saran-saran**

Berdasarkan uraian di muka dapat diajukan kesimpulan dan saran sebagai berikut:

### **1. Kesimpulan**

- a. Meskipun Propinsi Jawa Tengah memiliki jumlah sasaran lebih banyak dibanding propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, namun hasil pencapaian penuntasannya relatif sama. Pada tingkat kabupaten ternyata tingkat penuntasannya cukup tinggi.
- b. Baik di tingkat propinsi maupun di tingkat kabupaten kesiapan pemerintah dalam hal ini tim pelaksana menunjukkan kesiapan yang cukup tinggi, mulai dari proses pendataan/perencanaan, pelaksanaan program sampai kepada evaluasinya.
- c. Dilihat dari angka-angka, keikutsertaan sasaran dalam penuntasan wajar dikdas sangat menggembirakan, tetapi karena faktor geografis dan ekonomi, yang sangat mempengaruhi sasaran wajar dikdas dalam proses pembelajarannya masih belum menunjukkan keterlibatan yang ajeg dan terus-menerus; ditemukan di lapangan tingkat keberhasilan sasaran dalam kegiatan belajar mengajar belum seperti yang diharapkan;
- d. berkaitan dengan butir c, keadaan orang tua sasaran berpengaruh terhadap kesiapan sasaran wajar dikdas (baik geografis maupun ekonomis);
- e. belum ditemukan adanya kerjasama dari dunia usaha dan industri dalam pelaksanaan wajar dikdas.

### **2. Saran-saran**

Sejalan dengan kesimpulan tersebut, disini dapat diajukan saran sebagai berikut:

- a. tingkat pencapaian penuntasan perlu ditelusur lebih jauh dan dicari data yang lebih akurat mengingat data yang ada selama

- ini dari berbagai sumber yang berbeda-beda menunjukkan banyak perbedaan;
- b. proses pendataan di tingkat paling bawah perlu lebih dicermati dan dijaga akurasinya dengan memperhatikan segi-segi metodologis, efisiensi dan pemanfaatannya;
  - c. perlu terus menerus dan intensif dilaksanakan penyuluhan dan penyebarluasan wajar dikdas sampai ke lapisan paling bawah secara teratur dan tepat sasaran (dibarengi dengan menjaga kontinuitas keaktifan sasaran dalam kegiatan pembelajaran) secara multi media;
  - d. penyuluhan dan penyebarluasan wajar dikdas dengan sasaran orang tua melalui saluran tokoh-tokoh masyarakat setempat;
  - e. upaya penggalan dukungan dari dunia usaha dan industri agar dilaksanakan terus menerus di tingkat propinsi dan kabupaten dengan pendekatan yang saling menguntungkan untuk kedua belah pihak.

#### Daftar Pustaka

- Depdikbud. 1991. *Beberapa Deklarasi Dunia tentang Pendidikan Bagi Semua untuk Memenuhi Kebutuhan Belajar Dasar di Indonesia*. Ditjen Respo
- Depdikbud. 1994. *Repelita VI Kuantitatif-Propinsi*
- Depdikbud DIY. 1995. *Program Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Propinsi DIY*
- Republik Indonesia. 1994. *Rencana Pembangunan Lima Tahun ke enam 1994/1995 - 1998/1999 Buku V*

- Republik Indonesia. 1989. *Undang-undang No. 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional*. Surabaya: Usaha Nasional
- Mohammad Fakry Gaffar. 1995. *Perencanaan Strategi Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun di Indonesia*. Makalah IKIP Bandung
- Tim Koordinasi Wajar Dikdas Propinsi DIY. 1995. *Hasil Rapat Koordinasi Wajib Belajar Pendidikan Dasar Propinsi DIY 1994/1995*
- Tim Koordinasi Wajar Dikdas Propinsi DIY . 1995. *Laporan Pelaksanaan Rapat Koordinasi Wajar Dikdas Propinsi DIY 1994/1995*
- Tim Koordinasi Wajar Dikdas Kabupaten Wonosobo. 1995. *Laporan Pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun*.